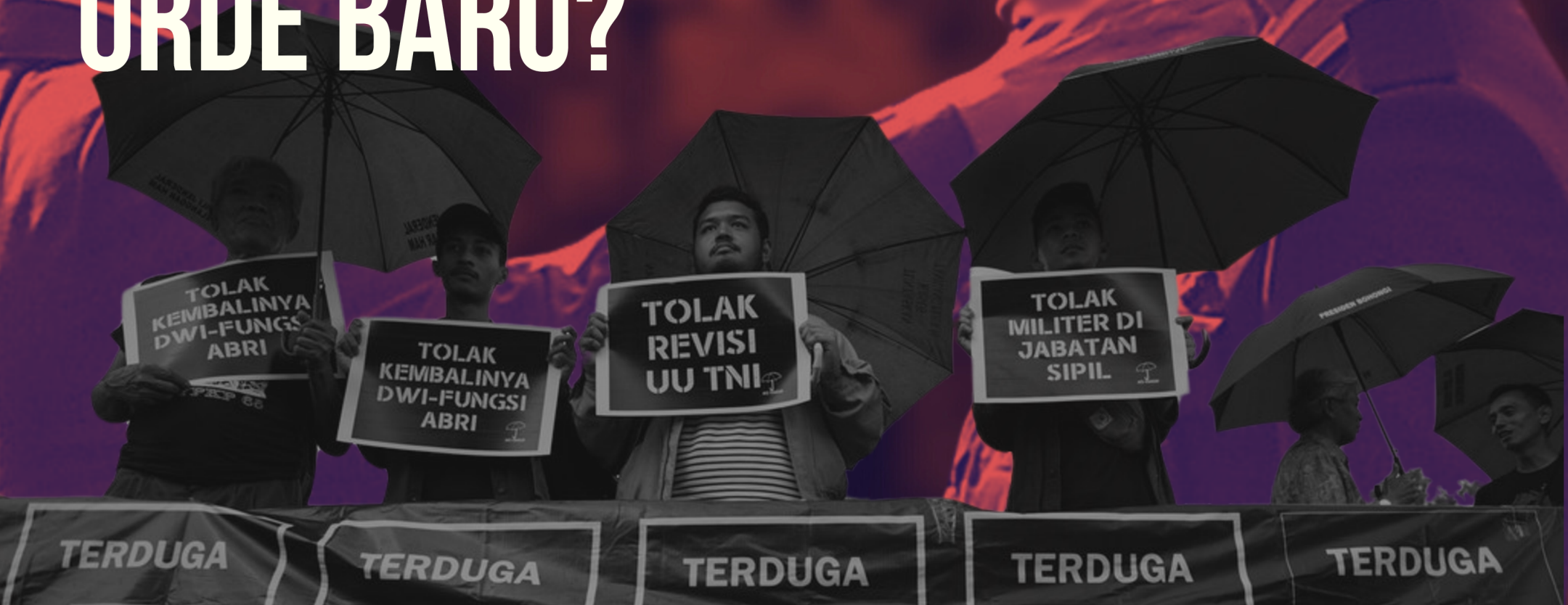


PERLUASAN KEWENANGAN DI REVISI UU TNI DAN RUU POLRI, JADI BALIK LAGI KE ORDE BARU?





**Akhir-akhir ini
banyak banget deh
berita soal ini nih**

**Hadeh, polisi dan TNI bukannya menjaga keamanan
malah melakukan kekerasan kepada masyarakat
sipil??**



SEGUDANG KASUS

Sobat CWI inget nggak kasus tewasnya AM, anak berusia 13 tahun di Padang, Sumatera Barat, dengan dugaan kuat dianiaya oleh oknum polisi?? Nah, kasus penganiayaan dan penghilangan nyawa oleh kepolisian maupun TNI nggak cuma satu dua kali terjadi, tapi udah sering!


[Kompas.com / News / Nasional](https://www.kompas.com/news/nasional)

Cerita Keluarga Afif Maulana, Dimarahi Polisi hingga Diminta Tanda Tangan Agar Kasus Tak Dilanjutkan



TNI juga banyak terlibat dalam berbagai kasus. Misalnya, penganiayaan dan penghilangan nyawa seorang yang diduga menjual obat-obatan ilegal, Imam Masykur, oleh tiga oknum TNI dan Paspampres (2023).

Selain itu, kita juga nggak jarang lihat atau dengar berita soal penganiayaan warga sipil di Papua oleh oknum-oknum TNI.



Menelusuri kasus penyiksaan warga sipil oleh prajurit TNI di Puncak, Papua – 'Kami bebas melakukan apapun yang kami suka'

Anggota TNI Pembunuh Imam Masykur Divonis Bui Seumur Hidup dan Dipecat

CNN Indonesia

Sering terjadi tapi apa upaya tegas untuk menghapuskan kekerasan terhadap warga sipil?

REVISI UU TNI DAN UU POLRI

Di tengah maraknya berbagai kasus penganiayaan oleh oknum TNI dan Polri, wacana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang saat ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru terkait perluasan wewenang TNI maupun Polri.

Dalam revisi UU Polri, pasal yang mendapat sorotan adalah terkait kewenangan dalam penindakan, pemblokiran, pemutusan dan perlambatan akses ruang siber. Hal ini berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.

PERLUASAN KEWENANGAN TNI DAN POLRI

Pasal yang mendapat sorotan pada revisi UU TNI yaitu perubahan pasal terkait perluasan penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga non kementerian sehingga perannya dapat lebih luas serta dapat berkarir di kementerian (menduduki jabatan sipil).



Pasal-pasal tersebut malah memberikan kewenangan yang berpotensi disalahgunakan oleh kepolisian dan TNI, apalagi dalam RUU yang dirancang tidak ada pengawasan yang jelas terhadap kewenangan Polri dan TNI.

Ditambah sejumlah fakta kekerasan yang dilakukan oleh TNI dan Polri acapkali lolos dari sanksi tegas dan terus berulang.

Kalau seperti ini jelas sekali kan menunjukkan bahwa ada upaya mengembalikan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.

APA SIH DWIFUNGSI ABRI?



Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merupakan salah satu kebijakan Orde Baru yang menempatkan **militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan keamanan negara tapi juga terlibat langsung dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan ideologi.**

Berkembangnya dwifungsi ABRI pada saat itu membuat militer sangat dominan dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. Mereka (militer) turut mengisi kursi-kursi eksekutif maupun legislatif, dan masuk ke partai politik (Golkar pada masa itu), hingga sistem pemerintahan saat itu berubah menjadi rezim yang lebih otoriter dengan dalih menjaga stabilitas politik demi berjalannya pembangunan.

Namun, meski kekuasaan militer sejak reformasi sudah mulai dipisahkan dari urusan-urusan sipil, dwifungsi ABRI yang berlangsung kurang lebih 30 tahun terlanjur mengakar dan mempengaruhi sistem perpolitikan di Indonesia hingga saat ini.



TNI AKTIF DI JABATAN SIPIL ERA JOKOWI

Berikut adalah daftar beberapa perwira TNI aktif yang pernah



Bahkan dapat kita lihat sekarang ini banyak mantan perwira atau pensiunan militer masih duduk di jabatan-jabatan sipil, yang dapat diartikan bahwa kalangan militer masih dibiarkan untuk memperoleh pengaruh politik di dalam pemerintahan.

Selama masa transisi pasca Pemilu 2024, banyak RUU bermasalah yang dibahas dan disahkan secara terburu-buru dan tanpa melibatkan masyarakat. Bandingkanlah dengan RUU yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat seperti RUU Masyarakat Adat, RUU PPRT, yang malah mandek selama bertahun-tahun.

Kondisi ini terjadi apa karena Presiden terpilihnya dari kalangan militer ya?

MARI #TOLAKRUUTNIPOLRI DAN JAGA DEMOKRASI UNTUK MASYARAKAT SIPIL!

REFERENSI

BBunte, M., & Ufen, A. (Eds.). (2008). *Democratization in Post-Suharto Indonesia* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203934760>.

Yosarie, Ikhsan et al. Imparsial. (2023, Agustus). "Kertas Kebijakan Mengawal Reformasi Tentara Nasional Indonesia Melalui Penolakan Usulan Perubahan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia".

CNN Indonesia. (2023, Agustus 30). Kronologi Penculikan dan Penganiayaan Imam Masykur oleh Anggota TNI. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230830121606-12-992299/kronologi-penculikan-dan-penganiayaan-imam-masykur-oleh-anggota-tni>.

Hukum online. (2024, Juli 3). RUU Polri Beri Kewenangan Sangat Luas, tapi Minim Pengawasan. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-polri-beri-kewenangan-sangat-luas-tapi-minim-pengawasan-lt66855b72b714d/>.

Kompas. (2024, Juli 4). Menyoal Kematian Afif Maulana di Padang, Disiksa Polisi atau Loncat ke Sungai?. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2024/07/04/115500978/menyoal-kematian-afif-maulana-di-padang-disiksa-polisi-atau-loncat-ke?page=all>.

REFERENSI

Tirto.id (2024, Juni 4). 12 Poin Penting Draf Revisi RUU Polri Mengapa Kontroversial? Diakses melalui <https://tirto.id/pasal-penting-draf-revisi-ruu-polri-mengapa-kontroversial-gZeJ>

Sumber Foto

BBC Indonesia

CNN Indonesia

Detik.com

Kompas.com